

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Keamanan yang ada pada pengendalian internal di organisasi perlu dilakukan agar aset dapat terhindar dari pemborosan, kecurangan, dan ketidakefisienan serta mengembangkan lebih baik lagi pada ketelitian yang berpengaruh dalam kredibilitas laporan keuangan. Pada konteks pengendalian internal merupakan proses yang memiliki pengaruh terhadap sistem yang akan dirancang untuk mendukung pencapaian suatu tujuan organisasi. Pengendalian internal mengacu pada prosedur yang dibuat oleh manajemen dengan tujuan meningkatkan efisiensi operasional, pelaporan keuangan dalam menjaga aset dan investasi (Lartey *et al.*, 2020).

Pada tahun 1992 COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treatway Commission*) membangun model pengendalian internal dengan komponen spesifik diantaranya lingkungan perusahaan yang memadai dengan menerapkan nilai-nilai integritas. Komponen-komponen tersebut merupakan pondasi bagi suatu perusahaan yang memiliki pengendalian internal yang baik. Dengan komponen-komponen tersebut segala aktivitas perusahaan akan divalidasi, dipantau, diproses, dan dilaporkan secara tepat, jelas, dan akurat. Berdasarkan *KPMG Fraud Survey 2006* ditemukan salah satu jasa profesional di dunia terdapat kelemahan pengendalian internal merupakan faktor utama penyebab kasus kecurangan yang terjadi sebanyak 33%. Serta faktor kedua mencapai 24% karena penggunaan sistem pengendalian internal yang diabaikan. Maka penting adanya pelaksanaan dan pengawasan dalam pengendalian internal (Iqbal *et al.*, 2017).

Pengendalian internal organisasi di Indonesia memiliki peranan yang sangat diperlukan dalam pembangunan nasional. Organisasi di Indonesia khususnya pemerintah daerah dengan kewenangan dalam lingkup otonomi daerah, sehingga perlu sistem pengawasan yang baik guna menghindari kecurangan (*fraud*). Lemahnya pengendalian internal di suatu organisasi khususnya disektor

pemerintahan atau swasta merupakan penyebab utama terjadinya kecurangan (Iqbal *et al.*, 2017). Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang baik perlu dilakukan guna pemerintah daerah dapat meyakinkan sepenuhnya dalam mencapai tujuan bersama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara Pasal 56 ayat (4) pengelolaan daerah pada keuangan harus didasarkan penggunaan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan berlandas pada standar akuntansi pemerintah. Salah satu tujuan SPI pada pemerintah daerah untuk melindungi aset negara berupa aset data atau fisik, dapat menjaga terperinci catatan maupun dokumen yang tepat, informasi mengenai keuangan dihasilkan secara benar dan teliti, meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan organisasi, serta menjamin ketaatan pada kebijakan manajemen dan peraturan serta hukum atau UU yang berlaku.

Berdasarkan Survei *Fraud* Indonesia diketahui bahwa adanya Kelemahan Pengendalian Internal (KPI) memiliki persentase sebesar 29,6% yang mengungkapkan berbagai kecurangan maupun tindakan penyimpangan yang terjadi di Indonesia. Sehingga masih minim implementasi pengendalian internal yang dilakukan di Indonesia. Banyak dampak buruk telah dirasakan dan menimbulkan beberapa kondisi krisis dan berdampak ke berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Pada kondisi ekonomi itu sendiri semakin buruk dan lemahnya pengawasan dalam kegiatan yang dilakukan institusi. Pemerintah harus dapat menyikapi hal ini agar dapat meminimalisir kejadian permasalahan dengan menggunakan sistem pengendalian dan pengawasan yang lebih optimal dalam penggunaan anggaran untuk bidang kesehatan, bidang sosial, dan penanganan dampak ekonomi dapat diprioritaskan (Putra, 2021). Selain itu, permasalahan KPI sebesar 22% yang diungkapkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020. Di temukan permasalahan terkait KPI seperti pelaksanaan program yang tidak dilaksanakan secara bertahap sesuai jadwal, sehingga terdapat sisa yang belum disalurkan terkait dari dana kegiatan sebesar Rp 6,77 triliun serta pada pengendalian dan pelaksanaan program yang masih belum memadai (Liputan6.com, 2020).

Beberapa faktor atau aspek yang dapat mempengaruhi turun naiknya pada Kelemahan Pengendalian Internal (KPI) yakni Ukuran Pemerintah Daerah,

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Dana Bantuan Sosial, dan Tindak Lanjut Hasil Audit. Dilihat pada laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat pengaruh dari pengelolaan total aset, PAD, Belanja Modal, Dana Bantuan Sosial, dan Tindak Lanjut Rekomendasi terhadap KPI. Dari permasalahan yang terjadi pada lingkup pemda dengan membandingkan terkait besar atau kecilnya temuan permasalahan KPI. Berdasarkan temuan Sistem Pengendalian Internal dalam IHPS semester pertama dan kedua tahun 2020 yaitu :

Tabel 1 : Temuan Kelemahan Pengendalian Internal

No	IHPS Tahun 2020	Objek Pemeriksaan	Permasalahan	Kelemahan Pengendalian Internal
1	Semester I	546 Pemda	6.160 Temuan	5.175 Temuan
2	Semester II	183 Pemda & BUMD	2.277 Temuan	506 Temuan

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS)

Dapat dilihat tabel 1 diatas, diperoleh dari IHPS BPK RI Semester Pertama Tahun 2020 memuat 546 objek pemerintah daerah (PEMDA) dari hasil pemeriksaan mendapat 541 hasil pemeriksaan keuangan dan 5 kinerja. Dilihat pada laporan IHPS pertama tahun 2020 didapati jumlah temuan permasalahan sebanyak 10.499 yang diantaranya terdiri dari kelemahan pengendalian 5.175 dengan tingkat persentase 49% dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak Rp1,52 triliun atau 5.324 dengan tingkat persentase 51%. Sedangkan IHPS Kedua Tahun 2020 memuat 183 objek Pemda dan BUMD, ditemukan jumlah permasalahan sebesar 2.277 yang terdiri dari kelemahan pengendalian 506 dengan tingkat persentase 22%, permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebanyak 1.071 dengan tingkat persentase 47% dan ketidakpatuhan sebesar Rp 1,30 triliun atau 700 dengan tingkat persentase 31%.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa SPI pada pemerintah daerah dikatakan belum dapat berjalan dengan baik sepenuhnya karena beberapa temuan permasalahan dari objek pemeriksaan tersebut. Pada sistem pengendalian internal yang belum optimal, menyebabkan beberapa permasalahan seperti tidak memadainya perencanaan kegiatan, pencatataan yang belum dilakukan atau tidak akurat atau dalam pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai ketentuan penyaluran dana bantuan sosial belum tertib, Maka dalam permasalahan kelemahan

Dwi Nurmala Sari, 2022

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERNAL PADA PEMERINTAH DAERAH

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Sarjana Akuntansi
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

pengendalian internal secara umum terjadi penyimpangan pada ukuran pemerintahan daerah (aset), PAD, belanja modal, dana bantuan sosial, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di beberapa daerah (IHPS BPK RI, 2020).

Untuk ukuran pemerintah (total aset) menjadi faktor kelemahan pengendalian internal. Ukuran Pemerintah Daerah merupakan sebuah skala yang menghasilkan nilai besar atau kecil dapat menunjukkan keadaan pemerintah daerah, sehingga dapat mendorong penerapan praktik pengendalian internal lebih baik (Saferi & Mulyani, 2020). Ditemukan pencatatan yang belum dilakukan atau tidak akurat pada pemerintah daerah sebanyak 473. Terdapat jumlah aset sebesar 2.815,08 trilliun pada Laporan Realisasi Anggaran. Permasalahan terjadi disebabkan tidak optimal dalam pelaksanaan penegakkan terkait pemahaman akuntansi serta pelaporan kepada pelaksana, kemudian pada pengawasan dan pengendalian belum optimal. Adanya penyajian dalam LKPD tahun 2019 terkait akun tidak sesuai SAP dan bukti yang kurang cukup seperti permasalahan pada penyajian akun aset. Kondisi tersebut dapat disimpulkan kurangnya pengawasan dan pengendalian internal menyebabkan permasalahan pada KPI. Penelitian dari Pamungkas *et al.*, (2019) menemukan ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap KPI. Namun, penelitian Santander (2017) ; Fauzia (2018); dan Saferi & Mulyani, (2020) tidak menemukan hubungan ukuran pemerintah daerah terhadap KPI.

Menurut Aini *et al.*, (2017) menyatakan bahwa pemerintah daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) bernilai tinggi tidak membuat tingginya temuan kelemahan pengendalian internal (KPI). Sehingga dapat dikatakan KPI yang bernilai besar bukan berarti disebabkan nilai PAD pada pemda juga bernilai tinggi. Namun, pada Hasil Pemeriksaan BPK semester pertama terdapat KPI dalam pelaksanaan pendapatan sebesar 2.338 dengan persentase sebesar 45%. Sekitar 900 permasalahan KPI disebabkan karena banyak UPTD yang masih belum melakukan rekonsiliasi penataan data. Sedangkan pada Hasil Pemeriksaan semester kedua ditemukan KPI yang dalam pengelolaan PAD masih belum maksimal. Pendapatan yang diterima dari pemanfaatan barang milik daerah belum dilaksanakan dengan baik sehingga tidak dapat memberikan kontribusi pada peningkatan PAD. Dapat disimpulkan PAD yang bernilai tinggi akan mempengaruhi dalam pengelolaan data,

sehingga menyebabkan KPI juga bertambah. Penelitian Iqbal *et al.*, (2017) dan Pamuji (2017) mendukung PAD berpengaruh signifikan terhadap KPI. Namun, Aini *et al.* (2017) dan (Fauzia, 2018) tidak menemukan pengaruh PAD terhadap KPI.

Belanja modal juga menjadi faktor penyimpangan terkait kelemahan pengendalian internal. Menurut Aini *et al.* (2017) jika suatu daerah semakin banyak jumlah belanja modal untuk alokasi pengadaan aset tetap juga semakin tinggi, artinya rencana untuk penyediaan barang yang dilakukan pemerintah semakin tinggi kemungkinan akan terjadi kecurangan dalam pengadaan tersebut. Dilihat dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK semester pertama dan kedua ditemukan pada pemerintah daerah masih banyak yang tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam merealisasikan belanja modal serta masih banyak bukti pertanggungjawaban yang tidak terkait realisasi belanja modal pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini menunjukkan pada kegiatan perencanaan yang belum dilaksanakan, karena sistem pengendalian internal yang kurang memadai. Sesuai Zahroh (2017) menemukan pengaruh terhadap KPI. Namun, tidak didukung dengan penelitian Aini *et al.* (2017); Iqbal *et al.* (2017) dan Pamungkas *et al.* (2019) yaitu belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap KPI.

Penyaluran dana bantuan sosial bukan hal yang baru dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi bantuan yang diberikan kepada masyarakat masih banyak yang kurang optimal dengan permasalahan kurang mendukungnya sistem yang ada. Didapatkan data dari Hasil Pemeriksaan BPK semester kedua yakni sebanyak 78 pemerintah daerah (PEMDA) pendataan penerima bantuan tidak akurat, pada 82 pemda penyaluran bansos tidak tepat sasaran dengan nominal Rp 8,09 miliar, adanya bantuan sosial yang belum disalurkan sebanyak Rp 29,26 miliar, dan penyaluran bantuan sosial tidak sesuai dengan kondisi kenyataannya sebesar Rp 59,08 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa dana bantuan yang tinggi mempengaruhi kelemahan pengendalian internal karena pengelolaan atas bantuan sosial pada pemerintah daerah masih belum memadai. Maka perlu adanya basis data penerima yang akurat serta pengawasan dalam melakukan penyaluran bantuan sosial agar tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Ditemukan hasil penelitian Nurwani (2018) kegiatan pengelolaan bantuan sosial masih belum dilaksanakan dengan baik

karena pemantauan dan pengawasan dalam sistem pengendalian internal kurang optimal.

Pamungkas *et al.* (2019) menyatakan bahwa semakin tinggi penilaian pada temuan hasil audit akan mempengaruhi penurunan pada jumlah temuan. Berdasarkan hasil pemantauan dari pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi menjadi tindak lanjut hasil audit. Dari informasi IHPS pertama rekomendasi pada pemerintah daerah sebanyak 2.242 atau 24,1% dengan nilai sebesar Rp 115,34 miliar. Sedangkan semester kedua memperoleh rekomendasi yang ditindaklanjuti sebanyak 7.891 atau 29,8% dengan nilai sebesar Rp 410,24 miliar. Dapat disimpulkan dari hasil rekomendasi pada semester pertama jika diimplentasikan dengan baik, maka hasil pada semester kedua meningkatkan yang memberikan dampak pada kelemahan pengendalian internal menjadi menurun. Sehingga dengan tindak lanjut hasil audit yang tinggi pun masih banyak terjadinya penyimpangan. Hasil penelitian Pamungkas *et al.* (2019) Tindak Lanjut Hasil Audit mempunyai signifikan terhadap KPI. Artinya, sesuai dengan hasil rekomendasi audit yang diperoleh maka pemerintah daerah perlu adanya pelaksanaan untuk menyelesaikan rekomendasi tersebut yang bertujuan untuk mencegah terjadinya temuan yang serupa. Namun, penelitian Fariid (2019) dan Sugiyanti (2018) tidak menemukan hubungan tindak lanjut hasil audit terhadap kelemahan pengendalian internal.

Penelitian ini memodifikasi dari Pamungkas (2019) dengan menggunakan 4 Variabel yaitu Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Tindak Lanjut Hasil Audit yang melakukan metode analisis regresi berganda. Kemudian peneliti menambahkan variabel independen lain yaitu Dana Bantuan Sosial dari saran Nurwani (2018) dengan sampel seluruh Pemerintah Daerah se-Indonesia tahun 2019, dikarenakan dalam pelaksanaan mengenai bantuan sosial sering terjadi penyelewengan. Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui apakah ada hubungannya dengan penerapan pengendalian internal, maka judul yang dibuat yaitu “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pada Pemerintah Daerah”.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Apakah Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kelemahan Pengendalian Internal?
- b. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Kelemahan Pengendalian Internal?
- c. Apakah Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kelemahan Pengendalian Internal?
- d. Apakah Dana Bantuan Sosial berpengaruh positif terhadap Kelemahan Pengendalian Internal?
- e. Apakah Tindak Lanjut Hasil Audit berpengaruh negatif terhadap Kelemahan Pengendalian Internal?

I.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu :

- a. Untuk membuktikan Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kelemahan Pengendalian Internal.
- b. Untuk membuktikan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Kelemahan Pengendalian Internal.
- c. Untuk membuktikan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kelemahan Pengendalian Internal.
- d. Untuk membuktikan Dana Bantuan Sosial berpengaruh positif terhadap Kelemahan Pengendalian Internal.
- e. Untuk membuktikan Tindak Lanjut Hasil Audit berpengaruh negatif terhadap Kelemahan Pengendalian Internal.

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diharapkan penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman atas penggunaan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan di daerah, dengan gambaran permasalahan yang disajikan maka teori pada penelitian ini dapat diaplikasikan dalam pengembangan ilmu untuk meminimalisir kelemahan pengendalian internal dengan melihat faktor apa saja yang mempengaruhi, sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini, peneliti mendapat pengetahuan mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi permasalahan pada kelemahan pengendalian internal serta menambah pandangan dalam penggunaan pengendalian internal yang lebih baik sehingga dapat digunakan secara optimal.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Pelaksanaan dari riset ini peneliti harap dapat mendorong pemerintah daerah dan memberikan dukungan dalam peningkatan atas pengawasan dan keamanan aset yang di miliki daerah agar dana dapat disalurkan dengan baik.

3. Bagi Investor

Melalui penelitian ini dapat menyajikan dan memberikan informasi bagi para investor dalam suatu rencana untuk mengambil keputusan terkait atas pertimbangan dana di daerah tertentu.